

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tugas Panggilan Gereja

1. Pengertian Gereja

Gereja dalam Perjanjian Lama disebut sebagai *kahaal*, yang memiliki ciri-ciri: Allah mengumpulkan, Artinya adalah pengabdian kepada Allah, bukan untuk memperoleh keuntungan pribadi, melainkan untuk melayani semua orang (Kej. 12:3). Allah memberikan firman dan sakramen-Nya, sementara sikap umat Israel adalah mempercayai.¹¹ Dalam Perjanjian Lama, Israel sendiri merupakan bagian pertama dari gereja Yesus Kristus. Gereja dalam Perjanjian Baru adalah "*Ekklesiastikal*", yang berarti mereka yang dipanggil untuk keluar. Ini menggambarkan gereja sebagai kumpulan orang yang dipilih oleh Allah untuk keluar dari dunia, meninggalkan dosa, dan memasuki wilayah anugerah.¹²

Dalam kamus Yunani "*Ekklesia*" diartikan sebagai sidang, jemaat, kumpulan.¹³ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gereja adalah tempat (rumah) di mana orang berdoa dan melakukan upacara agama

¹¹ R Soedarmo, *Ikhtisar Dogmatika* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009), 219.

¹² R.C Sproul, *Kebenaran-Kebenaran Dasar Iman Kristen* (Malang: Depertemen Literatur SAAT, 2002), 285.

¹³ Barclay M. Newman Jr., *Kamus Yunani-Indonesia Untuk Perjanjian Baru* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016), 51.

Kristen. Gereja juga dapat diartikan sebagai organisasi atau badan umat Kristen yang berbagi kepercayaan, ajaran, dan praktik ibadah yang sama (seperti gereja Katolik, gereja Protestan, dll.).¹⁴ Gereja, yang dalam bahasa Inggris disebut "*Church*" adalah kelompok orang yang didirikan oleh Yesus Kristus dan diurapi oleh Roh Kudus sebagai tanda terakhir niat Allah untuk menyelamatkan semua orang. Pewartaan, kehidupan sakramental, pelayanan pastoral, dan organisasi komunitas menunjukkan kehadiran Allah di antara manusia.¹⁵ Gereja merupakan kumpulan orang yang dipanggil untuk memasuki wilayah anugerah dan percaya kepada Yesus Kristus dan menyatakan kasih-Nya melalui pelayanan di dunia ini.

2. Panggilan Gereja

Dalam memahami peran dan tanggungjawab gereja, terdapat tiga panggilan utama yang sering disebut sebagai tri panggilan gereja. Ketiga panggilan ini menggambarkan inti dari eksistensi dan tugas gereja sebagai umat pilihan Tuhan di dunia yang saling terkait dan menjadi dasar pelayanannya. Tri panggilan gereja tersebut dijelaskan sebagai berikut:

¹⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 357.

¹⁵ Gerald O' Collins and Edward G. Farrugia, *Kamus Teologi* (Yogyakarta: Kanisius, 1996),

a) Koinonia (Bersekutu)

Koinonia berarti hidup dalam persekutuan atau komunitas orang-orang yang percaya kepada Allah melalui Yesus Kristus dalam kuasa Roh Kudus. Koinonia terwujud dalam penghayatan hidup berjemaat, berkumpul bersama dihadapan Tuhan, menyanyi, berdoa, melaksanakan pelayanan sakramen, peneguhan dan menguatkan yang lemah dan peduli terhadap sesama.¹⁶ Persekutuan tersebut didasarkan pada persatuan hati, persaudaraan yang tulus dan murni, serta semangat saling membantu serta berbagi tanggungan bersama (Galatia 6:2). Saling mendoakan satu sama lain (Filipi 1:9), menunjukkan keramahan pada sesama (Ibrani 13:2), dan memberikan dukungan dan semangat disetiap situasi (Ibrani 10:25).¹⁷

b) Marturia (Bersaksi)

Marturia maksudnya adalah sebagai umat Allah yang percaya berarti harus menjadi saksi Kristus di dunia, memberitakan dan mengajarkan firman Tuhan.¹⁸ Marturia diwujudkan dalam penghayatan hidup sebagai orang percaya dalam kehidupan sehari-hari.¹⁹ Marturia

¹⁶ Sirait Jamilin, *Terpanggil Memperbaharui: Peranan Gereja, Pendeta Dan Warga Jemaat* (Pematangsiantar: L-Sirana, 2011), 98.

¹⁷ Eva Inriani, "Strategi Gereja Memaksimalkan Tri Panggilan Gereja Pada Masa Pandemi Covid-19" (August 2021): 100.

¹⁸ Jamilin, *Terpanggil Memperbaharui: Peranan Gereja, Pendeta Dan Warga Jemaat*, 98.

¹⁹ Stimson Hutagalung, "Tugas Panggilan Gereja Koinonia: Kepedulian Allah Dan Tanggungjawab Gereja Terhadap Kemiskinan" 8, no. 2 (December 2016): 96.

juga dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan, Seperti ibadah, penggembalaan, kelas pembinaan terstruktur, pengembangan keluarga, kelas pembinaan dan pendampingan untuk generasi muda, serta program-program yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup anggota jemaat dalam masyarakat. Selain itu, juga ada pembinaan lainnya yang berfokus pada komunikasi iman kepada orang lain.²⁰

c) Diakonia (Melayani)

Diakonia pada umumnya merujuk pada upaya gereja dalam memberikan bantuan kepada anggota-anggota gereja yang mengalami kesulitan ekonomi karena didorong oleh kasih Kristus. Gereja dalam menjalankan panggilannya tidak seharusnya hanya berorientasi pada orang-orang seiman, melainkan juga harus memperhatikan dan melayani mereka yang tidak seiman.²¹ Pelayanan memiliki makna yang luas. Namun dalam hal ini Gereja hadir untuk peduli terhadap sesamanya. Kepedulian dan solidaritas gereja harus dalam tindakan yang nyata.²² Jangkauan pelayanan bukan hanya soal kebutuhan rohani melainkan juga persoalan jasmani.

²⁰ Inriani, "Strategi Gereja Memaksimalkan Tri Panggilan Gereja Pada Masa Pandemi Covid-19," 100.

²¹ Ibid.

²² Johannes Saragih, *Ini Aku Utuslah Aku: I Will Go, Send Me* (Jakarta: Suara Gereja Kristen Yang Esa, 2006), 195.

Diakonia bukan semata-mata untuk merasa puas karena bisa membantu orang lain atau tidak hanya sekadar memberikan bantuan, tetapi juga melibatkan kesediaan untuk menyelidiki akar permasalahan penderitaan mereka dan berusaha menemukan solusinya. Untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.²³ Dalam konteks ini, diakonia tidak hanya terbatas pada Diakonia Karitatif atau Pelayanan kasih dalam bentuk memberikan makanan dan pakaian kepada mereka yang kurang mampu, memberikan dukungan kepada orang yang sedang sakit bahkan berduka, serta terlibat dalam perbuatan kebaikan lainnya.

Diakonia juga dapat mengambil bentuk diakonia reformatif yang pelaksanaannya memberikan fokus pada pengembangan ekonomi, bantuan modal serta pelatihan keterampilan melalui penyelenggaraan kursus dan pemberian pinjaman modal. Tujuan akhir dari pelayanan diakonia adalah diakonia transformatif yaitu diakonia yang dilaksanakan dengan metode pemberdayaan atau pengorganisasian masyarakat untuk melayani orang miskin dan terisih. Rakyat kecil yang kurang memahami hukum dan kehilangan semangat berjuang perlu mendapatkan pelayanan, yaitu dengan menyadarkan mereka tentang hak-hak mereka

²³ Inriani, "Strategi Gereja Memaksimalkan Tri Panggilan Gereja Pada Masa Pandemi Covid-19," 101.

dan memberdayakan mereka. karena menjadi kelompok yang putus asa dan kehilangan harapan.²⁴

3. Peran Gereja Toraja Mamasa

Gereja Toraja Mamasa (GTM) merupakan suatu lembaga keagamaan yang diakui Dirjen Bimas Kristen Protestan, yang melembaga sebagai suatu Sinode. Diberikan oleh Allah dengan posisi gerejawi berdasarkan karunia-karunia khusus dan menerapkan sistem pengelolaan gereja dengan mengacu pada Presbiterian Sinodal berdasarkan tradisi teologi Calvinis.²⁵

Berdasarkan Tata Rumah tangga GTM tahun 2021 Bab IV Panggilan Pasal 5 menyebutkan :

1. Sebagai Gereja yang Esa, Kudus, Am, dan Rasuli yang mengemban misi Allah di bumi, maka GTM mewujudkannya dalam Tri Panggilan Gereja: bersekutu, bersaksi, melayani yang dijabarkan sebagai berikut:
 - a. Memperlengkapi dan menggerakkan warganya menjadi umat yang berbakti bagi Allah dalam persekutuan dengan kristus (bdk. Mat 18:20, Ef 4:3-6)
 - b. Memperlengkapi dan menggerakkan warganya menjadi kawan sekerja Allah demi merangkul segala bangsa melakukan apa yang dikehendaki Allah (bdk. Mat 28 :19-20) sehingga menjadi manusia baru yang layak bagi kehendak dan rencana Allah.
 - c. Memperlengkapi dan menggerakkan warganya menjadi umat Allah yang hidupnya menghadirkan damai sejahtera bagi segala makhluk (bdk. Mrk 16:15) dan mewujudkan tanda-tanda Kerajaan Allah dengan mengupayakan terwujudnya kesejahteraan hidup umat manusia, perdamaian, keadilan dan keutuhan ciptaan.

²⁴ Josef P. Widyatmadja, *Yesus & Wong Cilik Praksis Diakonia Transformatif Dan Teologi Rakyat Di Indonesia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017), 35–47.

²⁵ "Tata Dasar Dan Tata Rumah Tangga Gereja Toraja Mamasa" (Sinode GTM, 2021), 1.

d. Mempraaksarai terwujudnya masyarakat yang adil, damai sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang berkeadaban bersama-sama dengan semua pihak.

2. Mendorong terwujudnya kemandirian Teologi, daya dan dana.²⁶

Berdasarkan Tata Rumah Tangga GTM Bab II penyelenggaraan Tugas Panggilan GTM, Pasal 13 yaitu Pelayanan Kasih menyatakan :

1. Pelayanan kasih adalah upaya gereja mempraaksarai terwujudnya masyarakat yang damai sejahtera, berkeadilan, dan berkeadaban menurut teladan Yesus Kristus.
2. Pelayanan Kasih diwujudkan dalam bentuk diakonia karitatif, reformatif dan transformatif baik kedalam maupun ke luar gereja
3. Pelayanan kasih dapat diselenggarakan secara langsung ataupun bekerjasama dengan pihak lain yang diperlukan.
4. Gereja berpihak dan membela hak-hak kemanusiaan orang-orang yang lemah dan terpinggirkan (Orang miskin, Orang diffable (Cacat), Orang dengan orientasi seksual non hetero : Lesby Gay Beseksual dan Transgender, korban kekerasan fisik dan psikis, orang yang diminoritaskan dalam masyarakat, orang dengan penyakit menular: AIDS, COVID, dll, Orang dengan gangguan kejiwaan, orang dipenjara, dan sebagainya).
5. Bertanggung jawab memelihara kelangsungan hidup segala makhluk dan keutuhan ciptaan.²⁷

Berdasarkan Tata Rumah Tangga BAB III Pengajaran Dan Pembinaan

Pasal 14 Pengajaran dan Pembinaan, menjelaskan bahwa:

1. Pengajaran/pembinaan adalah bentuk pelayanan Gereja untuk memperlengkapi warganya dengan Firman Allah, pengakuan Iman dan pengajaran
2. Pengajaran/pembinaan diselenggarakan dalam 2 (dua) bentuk yakni:
 - a. Pendewasaan iman adalah bentuk pengajaran yang dibenarkan kepada anggota yang belum Sidi, meliputi:
 - i. Anak
 - ii. Remaja
 - iii. Katekisasi

²⁶ Ibid., 3–4.

²⁷ Ibid., 15–16.

b. Pendalaman iman adalah bentuk pengajaran/pembinaan yang diberikan kepada anggota yang sudah Sidi dengan memperhatikan kelompok kategori :

- i. Pengajaran/pembinaan bagi pemuda gereja.
- ii. Pengajaran/pembinaan bagi perempuan.
- iii. Pengajaran/pembinaan bagi kaum bapak (laki-laki).
- iv. Pengajaran/pembinaan bagi Lansia.
- v. Pengajaran/pembinaan bagi kelompok profesi.
- vi. Pengajaran/pembinaan bagi pejabat gereja,
- vii. Pengajaran/pembinaan Katekasasi, pra nikah dan pasutri

3. Bahan pengajaran Sekolah Minggu, remaja dan katekasasi ditetapkan secara khusus.²⁸

Dalam konteks Gereja Toraja Mamasa pemahaman ajaran memegang peranan penting dalam mendukung upaya mewujudkan keadilan sosial. GTM menekankan konsep persekutuan (koinonia) yang kuat di antara jemaat. Konsep persekutuan ini tidak hanya terbatas pada ikatan spiritual, tetapi juga mencakup dimensi sosial-ekonomi. GTM memandang bahwa jemaat tidak hanya berkumpul untuk ibadah, tetapi juga terlibat dalam saling menolong dan memperhatikan kesejahteraan satu sama lain. Praktik saling berbagi sumber daya, bantuan bagi yang membutuhkan , solidaritas antar jemaat, bahkan menjadi agen perubahan sosial yang terlibat aktif dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat yang termarjinalkan menjadi wujud nyata dari konsep persekutuan ini.

²⁸ Ibid., 16.

B. Keadilan Sosial

1. Konsep Keadilan Menurut Alkitab

Dalam bahasa Ibrani, kata "*mispāt*" diterjemahkan sebagai "hukum" atau "keadilan". Istilah "*mispāt*" berasal dari kata "*safat*" yang berarti "mengadili untuk menyelamatkan seseorang dari penindasan." baik dalam konteks yuridis, etis, maupun religius. Dalam Perjanjian Lama, terdapat juga pemimpin-pemimpin yang disebut "hakim" atau "*sofim*" dalam bahasa Ibrani, hakim yang membebaskan bangsa Israel dari penindasan oleh bangsa lain, seperti yang tercatat dalam Hakim-Hakim 2:16-19. Hakim bertindak demi keadilan serta menyelamatkan orang-orang dari penindasan. Secara umum, "*mispāt*" dapat merujuk pada "segala perbuatan baik dan benar". Di sisi lain, keadilan dapat dikaitkan dengan kebenaran, yang dalam bahasa Ibrani disebut "*sedaqah*" atau "*sedeq*". Keadilan dan kebenaran ini diterapkan dalam intervensi YHWH untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir.²⁹

Allah menghukum manusia karena dosa mereka dalam Kitab Kejadian. Dalam Kejadian 3, cerita tentang bagaimana Allah menghukum manusia pertama, Adam dan istrinya, Hawa, karena mereka tidak mengikuti perintah-Nya. Bahkan binatang yang paling cerdas di padang,

²⁹ Surip Stanislaus, "Kritik Sosial Nabi Israel-Yehuda" 15, no. 1 (January 2018): 68.

ular, juga dikutuk karena peranannya dalam membawa manusia ke dalam dosa. Selanjutnya dalam Kejadian 4, Allah menghukum Kain karena membunuh saudaranya Habel. Kain dihukum dengan menjadi pengembara dan pelarian di bumi.³⁰

Kitab Keluaran juga menunjukkan keadilan Allah dalam bentuk pembebasan Allah kepada umat pilihan-Nya yaitu bangsa Israel akibat penindasan yang terjadi di Mesir dengan menugaskan Musa untuk memimpin mereka meninggalkan perbudakan. Motif pembebasan dalam agama memiliki kaitan erat dengan keadilan sosial. Allah menghendaki untuk mewujudkan persaudaraan antar manusia, hubungan yang menghormati dan memuliakan martabat setiap individu. Allah menegakkan prinsip-prinsip keadilan sosial melalui penerapan hukum-hukum yang mengayomi hak-hak dan kewajiban individu, terutama mereka yang miskin dan tertindas. Allah juga mengutus para nabi-Nya untuk mengoreksi praktik-praktik ketidakadilan yang ada dalam masyarakat. Menurut pandangan ini, keselamatan manusia tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan keadilan sosial. Artinya, menjalankan ibadah semata-mata tanpa memperhatikan keadilan sosial adalah suatu bentuk praktik keagamaan yang keliru.³¹

³⁰ Surip Stanislaus and Arie R. Oktovianus Saragih, "Belas Kasih Dan Keadilan Allah" 17, no. 2 (June 2020): 69.

³¹ Stanislaus, "Kritik Sosial Nabi Israel-Yehuda," 69.

Nabi-nabi seperti Amos, Hosea, Yeremia, Yehezkiel, dan Yesaya muncul dari berbagai lapisan sosial dalam masyarakat. Mereka dari beragam latar belakang, termasuk rakyat biasa, petani, pemimpin keagamaan, dan bahkan pemerintah kerajaan. Sekalipun memiliki latar belakang yang berbeda, mereka memiliki keprihatinan yang serupa terhadap keadilan sosial. Dalam menjalankan tugas-tugas mereka, mereka terinspirasi oleh visi mengenai kehendak Allah. Mereka ingin menggantikan ketidakadilan dengan persaudaraan, penindasan dengan kebebasan, dan kedamaian.

Mereka secara tegas mengkritik kecurangan, penipuan, monopoli, penyuapan hakim-hakim, penghinaan terhadap martabat, pengorbanan orang-orang tak bersalah, serta berbagai bentuk ketidakadilan sosial lainnya. Tujuan utama adalah untuk memanggil masyarakat agar kembali kepada nilai-nilai yang adil, bermartabat dan sesuai dengan kehendak Allah.³²

Dalam Perjanjian Baru keadilan menjadi fokus utama, baik dalam hubungan dengan Allah maupun dalam konteks hubungan antarmanusia. Dalam Kitab Yohanes 17:25, penulis membicarakan doa Tuhan Yesus untuk murid-murid-Nya dan menyebut Allah sebagai Bapa yang Adil. Tuhan Yesus memberikan contoh yang sempurna tentang

³² Ibid., 71.

keadilan harus ditegakkan dalam kehidupan sehari-hari-Nya. Melalui kisah Tuhan Yesus yang menunjukkan Kasih-Nya kepada anak-anak, ketika ada orang tua yang ingin supaya Tuhan meletakkan tangan-Nya atas anak mereka. Para murid mencoba menghalangi orang tua tersebut, bahkan marah terhadapnya. Namun, Tuhan Yesus membela anak-anak dengan mengatakan agar mereka datang kepada-Nya (Mat. 19:13-14).³³

Yesus juga menunjukkan keadilan-Nya Dalam Kisah Zakheus di Injil Lukas 19:1-10, Yesus memilih untuk mengunjungi Zakheus meskipun ia adalah seorang pemungut cukai yang tidak disukai banyak orang. Banyak orang mengeluh dan mengkritik, karena merasa bahwa Yesus memasuki rumah orang berdosa. Namun, Zakheus menunjukkan perubahan hati yang nyata dan bertobat. Dia berkata kepada Yesus bahwa dia akan memberikan setengah dari hartanya kepada orang miskin dan jika dia telah menipu siapapun, dia akan mengembalikan empat kali lipat.

Dalam kisah ini, Yesus menunjukkan keadilan-Nya dengan memberikan kesempatan kepada Zakheus untuk bertobat dan mengubah hidupnya. Kisah ini juga menyoroti pentingnya keadilan dalam menyambut dan memperlakukan orang-orang yang dianggap berdosa atau dikucilkan oleh masyarakat. Yesus menunjukkan bahwa setiap

³³ Kosma Manurung, "Memaknai Ajaran Alkitab Tentang Keadilan Allah Dari Sudut Pandang Teologi Pentakosta" 1, no. 1 (May 2021): 100.

orang memiliki kesempatan untuk bertobat menerima kasih dan pengampunan-Nya, tanpa memandang status sosial atau latar belakang.

2. Konsep Keadilan Menurut Pancasila

Secara prinsipil, Keadilan adalah hak yang diberikan secara mutlak oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia untuk mencapai kehidupan yang layak sebagai makhluk sosial. Jika keadilan tidak dapat diwujudkan dalam masyarakat, maka manusia tidak akan pernah mencapai kehidupan yang layak dalam konteks kebersamaan. Esensi dari keadilan timbul karena adanya ketergantungan antara individu dalam kehidupan sosial. Soekarno menyatakan bahwa sila-sila yang terkandung dalam Pancasila berfungsi sebagai prinsip-prinsip dasar dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Dia menyebut Pancasila sebagai "lima prinsip". Nilai-nilai kemanusiaan dan kesetaraan merupakan ciri keadilan Pancasila.³⁴

Pancasila, sebagai falsafah dan ideologi bangsa, mengandung banyak aspek karakteristik keadilan. Pertama dan terpenting, Pancasila didasarkan pada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, Pancasila menempatkan hak asasi manusia sebagai prinsip utama dan menghargai martabat manusia yang merupakan makhluk sosial yang perlu dilindungi

³⁴ Ferry Irawan Febriansyah, *Keadilan Berdasarkan Pancasila: Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 171–172.

keadilannya. Ketiga, Pancasila mengutamakan nilai persatuan dan kesatuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk negara yang memberikan keadilan kepada semua warganya. Keempat, Pancasila menganut prinsip demokrasi untuk memastikan bahwa semua warga negara menikmati keadilan dalam mengungkapkan pendapat dan mendapatkan hak-haknya. Kelima, Pancasila berkomitmen untuk memberikan keadilan kepada semua warga negara tanpa pengecualian sesuai dengan hak-hak yang mereka miliki.³⁵

Keadilan sosial dapat dilihat dari sudut pandang bahwa negara Indonesia yang merupakan negara hukum, yang diharapkan dalam pembentukan undang-undang dan bahkan implementasi kebijakan dari undang-undang memiliki rasa keadilan.³⁶ Aparat penegak hukum perlu menyadari bahwa keadilan yang ditegakkan dalam negara hukum adalah keadilan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila, bukan hanya peraturan yang tertulis.³⁷ Keadilan dalam konteks pemerintahan dapat terwujud dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada dalam masyarakat, keadilan melibatkan prinsip pengaturan pembagian hak-hak rakyat berdasarkan proporsinya yang seharusnya.³⁸

³⁵ Ibid., 188.

³⁶ Made Hendra Wijaya, "Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila" 5, no. 2 (September 2015): 208.

³⁷ Febriansyah, *Keadilan Berdasarkan Pancasila: Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa*, 190.

³⁸ Sumiaty, Amos Susanto, and Merson, "Analisis Praktik Politik Masyarakat Lembang Pongdingao' Berdasarkan Etika Politik Perspektif Thomas Aquinas" 2, no. 1 (June 2022): 32.

Keadilan merupakan keadaan kehidupan yang lebih baik bagi setiap warga negara, yang tidak hanya merujuk kepada massa melainkan juga kepada pribadi atau individu, sehingga dimensi yang menonjol adalah mengatasi masalah sosial. Negara memiliki tanggung jawab untuk mendorong terciptanya keadilan sosial. Namun, pada kenyataannya, tujuan tersebut tidak harus tercapai. Persoalan pokok yang menyebabkan hal ini adalah intervensi yang dilakukan pihak penguasa. Terkadang, mereka menghalangi pelaksanaan keadilan sosial sering diabaikan karena dianggap mengganggu kepentingan pihak tertentu. Akibatnya, orang-orang yang telah bekerja keras tetap tidak melihat perubahan dalam nasib mereka..³⁹ oleh sebab itu apakah struktur yang ada di negara masih efektif atau justru menghambat terciptanya keadilan sosial yang sering kali disuarakan. Keadilan sosial memberikan makna bahwa tidak adanya diskriminasi yang dialami oleh setiap warga negara.⁴⁰ Keadilan itu sendiri dapat dinikmati oleh setiap orang tanpa terkecuali dan tanpa ada yang didahulukan.

Prinsip keadilan sosial terutama menitikberatkan pada perhatian khusus terhadap kesejahteraan warga negara yang berada dalam kelompok masyarakat yang terbelakang. Oleh karena itu, penting untuk memberikan perhatian yang lebih kepada kelompok masyarakat yang

³⁹ Adiwijaya, Surip Stanislaus, and Robertus Septiandry, "REALISASI SILA KEADILAN SOSIAL PANCASILA Tinjauan Filosofis Atas Sila V Pancasila" (March 2023): 67.

⁴⁰ Yohanes Suhardin, "Konsep Keadilan Dari John Rawls Dengan Keadilan Pancasila" 3, no. 2 (March 2023): 203.

terbelakang, sehingga dapat merupakan bagian tak terpisahkan dari masyarakat Indonesia, keadilan sosial harus dirasakan oleh semua. Di Indonesia, keadilan harus didasari oleh sikap peduli yang seimbang, tanpa memusatkan perhatian hanya pada satu bagian atau wilayah tertentu. Sangat penting untuk memastikan bahwa negara, sebagai lembaga publik, secara efektif dan adil mendistribusikan sumber daya kesejahteraan secara merata.⁴¹

3. Konsep Keadilan Dalam Perspektif Sosiologi

Dalam perspektif sosiologi juga peduli terhadap keadilan sosial. salah satunya Karl Marx yang menyatakan bahwa kekayaan yang ada di dunia ini lebih baik menjadi milik bersama dari pada menjadi milik pribadi.⁴² Perubahan sosial yang mengacu pada konsep materialisme yang dimana perkembangan dan perubahan manusia berdasarkan sejarah material.⁴³ Prinsip sosialisme Karl Marx ini membawa pada situasi meniadakan perbedaan dan membatasi hasrat untuk menguntungkan pribadi saja. Hal ini dikarenakan keuntungan pribadi yang bisa menyebabkan keburukan, iri hati, dan bahkan konflik dapat dihindari jika semua orang diperlakukan sebagai saudara.

⁴¹ Siregar, "Pancasila, Keadilan Sosial, Dan Persatuan Indonesia," 110–111.

⁴² Anthony Giddens, *Kapitalisme Dan Teori Sosial Modern: Suatu Analisis Karya Tulis Marx. Durkheim, Dan Max Weber* (Jakarta: UI-Press, 1986).

⁴³ F. Budi Hardiman, *KRITIK IDEOLOGI Menyingkap Pertautan Pengetahuan Dan Kepentingan Bersama Jurgen Habermas.*, 3rd ed. (Yogyakarta: Kanisius, 2009), 55.

Marx berpendapat bahwa dalam persaudaraan, setiap orang menerima hak yang sama: tidak ada yang memiliki lebih dari yang lain dan tidak ada yang kekurangan. Marx menganalisis ketegangan ekonomi yang timbul akibat konflik kepentingan antara kaum buruh (kelas bawah) dan kaum borjuis (kelas atas). Dalam pemahaman Marx, ketegangan ini muncul akibat perkebangan kepemilikan alat-alat produksi. Marx menambahkan, liberalisme memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk mendirikan pabrik dan membeli mesin, alat-alat produksi menjadi milik pribadi para kapitalis. Mereka kemudian mempekerjakan tenaga kerja untuk mengoperasikan mesin-mesin tersebut dan meningkatkan produksi.

Marx mengatakan bahwa pekerja menggunakan tenaga kerjanya untuk menambah nilai alat-alat produksi selama bekerja, dan mengubah nilai tersebut menjadi produk dengan menggunakan tenaga kerja yang dibeli dalam proses produksi menjadi bagian dari modal di tangan kapitalis. Para pekerja ini kemudian menjadi kekuatan yang menciptakan nilai.⁴⁴ Dengan menggunakan teori Marx, kesadaran akan adanya mekanisme objektif penindasan dan pemecahannya terungkap. Dalam konteks Marxian, kritik memiliki arti sebagai teori yang bertujuan untuk membebaskan dan melibatkan tindakan nyata. Marx tidak hanya

⁴⁴ Pardede, "Analisis Peran Gereja Sebagai Penyelenggara Keadilan Sosial Dalam Konteks Bangsa Indonesia," 49.

menggambarkan masyarakat, tetapi juga bertujuan untuk membebaskannya.⁴⁵ Kepemilikan pribadi yang memiliki manfaat sosial, membawa pada pembebasan.

4. Interseksionalitas dalam keadilan

Konsep interseksionalitas yang berasal dari Amerika Serikat melalui pemikiran Crenshaw yang awalnya mengidentifikasi perlakuan diskriminatif yang dialami perempuan di berbagai strata dan lapisan sosial masyarakat, seperti warna kulit dan stigma sosial yang berkembang. Konsep ini kemudian diperluas, seperti yang dicontohkan oleh karya Nash, yang menyatakan bahwa Interseksionalitas juga mencakup penanda identitas yang lebih luas, meliputi perbedaan agama, kewarganegaraan, suku, dan ras, yang juga berfungsi sebagai penanda politis identitas perempuan dan sumber-sumber diskriminasi.⁴⁶

Teori interseksionalitas juga dikemukakan oleh Collins, yang melihat adanya hubungan Collins menekankan keterkaitan antara dimensi gender dan dimensi lainnya, dengan pandangan bahwa perempuan tidaklah homogen. Perempuan memiliki latar belakang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti etnis, agama, kelas sosial, status perkawinan, dan seksualitas. Konsep interseksionalitas mengakui

⁴⁵ Hardiman, *KRITIK IDEOLOGI Menyingkap Pertautan Pengetahuan Dan Kepentingan Bersama Jurgen Habermas.*, 55.

⁴⁶ Anggaunita Kiranantika, "Memahami Interseksionalitas Dalam Keberagaman Indonesia: Tinjauan Dalam Sosiologi Gender" 4, no. 1 (June 2022): 50.

keberagaman ini, termasuk pengaruh ras, kelas, kecenderungan sosial, usia, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, dan kesehatan. Dalam keberagaman ini, perempuan sering menghadapi penindasan di berbagai domain, seperti struktural, disiplin, hegemoni, dan interpersonal. Penindasan ini saling berinteraksi, menciptakan ketidakadilan yang dialami oleh perempuan.⁴⁷ Sekalipun interseksionalitas awalnya secara khusus membicarakan diskriminasi perempuan namun kini interseksionalitas mengkaji bagaimana identitas seseorang mempengaruhi akses terhadap keadilan.⁴⁸

Interseksionalitas adalah keadaan yang menyebabkan timbulnya masalah sosial yang ada dalam jemaat, dipengaruhi oleh efek saling terkait dari latar belakang yang menyebabkan adanya perlakuan yang tidak sama. Dari teori Interseksionalitas digunakan untuk memahami dan menggali peran Gereja yang seharusnya berdasarkan keadaan Interseksionalitas yang ada di dalam jemaat, sehingga dapat ditemukan kesinambungan dalam pemahaman mengenai kehidupan sosial yang berkembang dalam gereja, terutama terkait dengan upaya membangun keadilan sosial di dalam gereja. Keadilan yang diharapkan adalah gereja mampu mengatasi masalah sosial yang dialami oleh anggota jemaat,

⁴⁷ Wabila Husna Cahyo Pamungkas, "Perempuan Indonesia Dalam Proses Pengambilan Keputusan Menjadi Pengantin Pesanan Ke Tiongkok: Perspektif Interseksionalitas Dan Otonomi Relasional," *Jurnal Kajian Wilayah* (May 2021): 27–28.

⁴⁸ <https://www.humanrightscareers.com>

keadilan yang membebaskan setiap anggota jemaat dari problem yang dialami.

5. Simpulan Teori Keadilan

Konsep keadilan sosial bersumber dari Alkita, Pancasila, dan Sosiologis, memiliki kesamaan dalam menekankan pembebasan bagi setiap individu dari kekacauan, penindasan, kemiskinan, perlindungan bagi kaum yang lemah, dan juga upaya untuk mewujudkan kesejahteraan. Perlu adanya koreksi yang diberikan bagi praktik-praktik ketidakadilan yang terjadi yang membawa kepada fungsi sosial dan mengutamakan manfaat sosial dalam tatanan kehidupan. Praktik saling berbagi, saling menolong, saling memperhatikan serta mengayomi hak-hak dan kewajiban setiap individu.

